

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya,

Ade Iskandar

Perspektif Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung.

Akhmad Suharyo

Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

Ani Heryani

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Ida Farida

Strategi Pembangunan Melalui Pengarusutaaan Gender (Analisis SWOT Pada Program Gender Watch di Kabupaten Gresik)

Rabina Yunus

Pengaruh Struktur Organisasi, Rentang Kendali dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Badan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kendari

Rola Yona Anto

Profil Kekuatan Usaha Dala Memanfaatkan Peluang Usaha Industri Kecil di Pasar

Supriyanto



e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 2 Agustus 2015

Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

Penanggung Jawab

Dr. YadiLustiadi, M.Si

Ketua Penyunting

Dr. Malik, M.Si

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Yulianto, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Supriyanto, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. AkhmadSuharyo, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. NurEfendi, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal, M.Si (FISIP-UHO)

Penyunting Pelaksana

Dra. AzimaDimiyati, MM

Vida Yunia Cancer, S.AN

Tata Usaha

Winda, SE

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu – Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 789825, Fax: (0721) 770261, E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 2 Agustus 2015

DAFTAR ISI

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya	1-20
Ade Iskandar	
Perspektif Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung	21-47
Akhmad Suharyo	
Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota	48-62
Ani Heryani	
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang	63-78
Ida Farida	
Strategi Pembangunan Melalui Pengarusutaaan Gender (Analisis SWOT Pada Program <i>Gender Watch</i> di Kabupaten Gresik)	79-94
Rabina Yunus	
Pengaruh Struktur Organisasi, Rentang Kendali dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Badan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kendari	94-111
Rola Pola Anto	
Profil Kekuatan Usaha Dala Memanfaatkan Peluang Usaha Industri Kecil di Pasar	112-129
Supriyanto	

**PRESPEKTIF KETAHANAN NASIONAL
DI PROVINSI LAMPUNG
AKHMAD SUHARYO**

DOSEN MAGISTER ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
EMAIL : AKHMAD_SUHARYO@YAHOO.CO.ID

ABSTRACT

The essence of national defense is a dynamic condition of local communities that provides ductility and toughness as a reflection of the ability to develop their potential and power of. It is used to face and overcome all forms of Threats, Challenges, Barriers and Disorders (TCBD), which may jeopardize the integrity, identity and survival of the nation and the struggle for national development goals in the region.

Based on the measurement model applied by the Indonesian Defense Organization, the parameters of the elements of geography, demography, natural resources, economic, social, cultural, defense and security, ideology, politics, willingness and ability to build, as well as overseas response, analysis of National security in Lampung Province compared with the national condition are at the center position. The endurance geography of Lampung Province is strong and need to be maintained and enhanced as seen from its location, Lampung Province has strategic and economic position, especially in the national transportation lines, both overland and sea lanes. The quality of public services and performances in some districts / cities classified as bad, it will have implications for the development of investment in Lampung that impact the durability of the overall area of Lampung province.

In general, in terms of quantitative values Astagatra, National Security of Lampung province is in the range between 43.534 to 76.110, or rather the corresponding calculation of 59.822 categorized quite strong. National Security conditions in Lampung province will continue to increase if the efforts to improve dynamic factors continue to be prioritized.

Key words: National Security, Threats, Challenges, Barriers and Disorders.

A. PENDAHULUAN

Ketahanan nasional di daerah sebagai kondisi dinamis bagi suatu daerah, mempunyai arti penting dalam melaksanakan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Di satu sisi hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembangunan akan meningkatkan kondisi ketahanan nasional, namun disisi lain dapat juga membawa hal yang bersifat negatif dalam kehidupan berbangsa akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Untuk itu ketahanan nasional di daerah sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan perlu dievaluasi agar kondisinya dapat dipelihara dan ditingkatkan sehingga mampu

menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik dari dalam maupun luar negeri.

Tulisan singkat ini memaparkan kondisi ketahanan nasional Provinsi Lampung dengan menggunakan metode pengukuran sesuai tolok ukur yang meliputi seluruh aspek Astagatra plus dari ketahanan nasional, dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap kondisi wilayah pemerintahan Provinsi Lampung. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat ketahanan nasional di Provinsi Lampung yang telah dicapai selama ini, sebagai bahan masukan dalam rangka menentukan kebijakan

pembangunan di daerah Provinsi Lampung, serta bahan kajian lebih lanjut untuk pengukuran ketahanan nasional secara utuh dan menyeluruh.

B. PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL

Pada hakekatnya Ketahanan Nasional suatu daerah adalah kondisi dinamis masyarakat, berisi keuletan dan ketangguhan sebagai cerminan kemampuan untuk mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki. Hal ini digunakan untuk menghadapi dan mengatasi segala bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG), yang dapat membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional, sebagaimana diamatkan dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat tiga dimensi yaitu:

- a. Dimensi keamanan, berupa melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia yang dijabarkan sebagai kemampuan untuk melindungi masyarakat terhadap setiap ancaman dari dalam maupun dari luar.
- b. Dimensi kesejahteraan, berupa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dijabarkan sebagai kemampuan untuk menumbuhkembangkan potensi guna mewujudkan kemakmuran yang adil merata.
- c. Dimensi pembentukan lingkungan, berupa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang diterjemahkan sebagai kemampuan untuk menciptakan dimensi keamanan dan kesejahteraan. Kondisi ketahanan suatu daerah perlu diukur ketangguhannya pada setiap saat, serta proyeksinya di masa depan, sehingga dapat direncanakan upaya-upaya strategis yang harus dilaksanakan untuk

mencapai tujuan pembangunan nasional.

C. DASAR PEMIKIRAN DAN LANDASAN TEORI

Berdasarkan definisi Ketahanan Nasional (*Tannas*), merupakan suatu kondisi dan potret kekuatan dan ketahanan suatu negara dan bangsa. Jika dibahas dengan pendekatan mekanika, keduanya dapat diartikan sebagai berikut:

a. Keuletan

Adalah kekuatan internal dari struktur material suatu benda yang diukur dalam batas kerusakan atau daya tahan. Dapat juga ditafsirkan bahwa keuletan merupakan sistem yang bersifat skalar.

b. Ketangguhan

Adalah kinerja dinamik benda dalam menghadapi gangguan dinamik dari luar. Ketangguhan bergantung pada jenis atau arah gangguan sehingga dapat didefinisikan sebagai vektor.

c. Gabungan Keuletan dan Ketangguhan

Gabungan dua besaran yang berbeda jenis, yaitu skalar dan vektor, akan menjadi vektor, meskipun secara besaran (magnitudo) ketangguhan dapat berbasis pada keuletan (fisik). Berdasarkan konsep momentum dapat didefinisikan besaran baru yang mencerminkan gabungan kekuatan dari keuletan dan ketangguhan bangsa sebagai ketahanan nasional. Sedangkan ketahanan nasional suatu daerah yang terdiri atas unsur-unsur fisik maupun non fisik, dijabarkan sesuai Astagatra menjadi unsur-unsur dominan yang paling mendasar, dilandasi oleh Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara serta sasaran dan tujuan pembangunan nasional.

Ketahanan nasional di definisikan sebagai kondisi dinamik bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dan mampu mengembangkan kekuatan nasional

dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung sebagai upaya menjamin kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai cita-citabwersama (Pranowo, 2010: 6). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ketahanan nasional merupakan suatu sistem yang didasarkan pada gatra-gatra meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa yang terdiri dari delapan gatra (Astagatra). Kedelapan gatra tersebut terbagi dua, yaitu *Trigatra* yang merupakan aspek alamiah dan bersifat statis, serta *Pancagatra* yang merupakan aspek sosial dan bersifat dinamis, ditambah aspek Kemampuan dan Kemauan dalam Membangun (MMB), serta Respons dari Luar Negeri (RLs), karena kedua aspek tersebut dianggap sangat mempengaruhi arah Ketahanan Nasional. Sedangkan dalam menganalisis ketahanan nasional, suatu daerah, baik yang bersifat statis maupun yang bersifat dinamis dilakukan secara komprehensif sehingga hasil pembangunan di daerah yang mencakup gatra-gatra kehidupan secara keseluruhan merupakan suatu paduan (integral) dari kondisi setiap gatranya. Kondisi salah satu gatra merupakan

$$F = \frac{\Delta TANNAS}{\Delta t}$$

$$\text{Keuletan} \frac{X \Delta \text{Ketangguhan}}{\Delta t} + \frac{\Delta \text{Keuletan} X \text{Ketangguhan}}{\Delta t}$$

Atau

$$F = \text{Massif} X \frac{\Delta V \text{Dinamik}}{\Delta t} + \frac{\Delta \text{Massif}}{\Delta t} X V \text{Dinamik}$$

→ → →

(Lemhanas RI : 2002)

Untuk menghitung Ketahanan Nasional selama ini, hanya berdasarkan Astagatra, pada hal dalam perhitungan aspek dinamis sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, faktor

integrasi dari kondisi elemen-elemen dari gatra bersangkutan, serta ketahanan dari masing-masing gatra dibangun oleh tingkat kondisi unsur-unsur dominan dari setiap elemen gatra tersebut. Oleh karena itu pengukuran tingkat ketahanan nasional di suatu daerah sebagai suatu sistem merupakan rangkaian proses yang dimulai dari setiap gatra yang ada didaerah yang bersangkutan.

Dengan meminjam istilah dari Lembaga Ketahanan Nasional RI bahawa apabila aspek kehidupan dimisalkan fungsi dari waktu, dengan dinamika perubahan terletak pada “Visi” dan “kepentingan” manusia (penduduk), baik bersifat sesaat ataupun jangka panjang. Ketergantungan terhadap waktu tersebut memungkinkan dipersepsikan adanya “Gaya Pertumbuhan” atau sesuatu yang mendorong/menarik pertumbuhan. Berdasarkan pengertian fisika gaya (F) adalah perubahan momentum terhadap waktu (t) sehingga dapat ditulis :

$$F = \frac{TANNAS}{t}$$

Dengan cara demikian dapat dipelajari hal-hal yang menyebabkan TANNAS naik atau turun. Selanjutnya rumus tersebut diuraikan sebagai berikut :

kemampuan dan kemauan untuk membangun serta respon luar negeri sangat berpengaruh. Oleh karena itu dalam perhitungan Ketahanan Nasional kedua faktor tersebut harus dimasukkan sebagai

faktor yang menentukan dan mempengaruhi aspek dinamis.

D. METODE PENENTUAN TOLOK UKUR

Guna mengukur Ketahanan Nasional Provinsi Lampung digunakan model momentum Ketahanan Nasional, dimana unsur-unsur Astagatra dibagi/dikelompokkan dalam *Skalar Masif* (SM), sebagai gatra yang terukur dalam besaran yang tidak berarah (bentuk fisik atau dapat dirasakan keberadaannya), yaitu geografi (G), demografi (D), sumber kekayaan alam (SKA), ekonomi (E), sosial budaya (S), Hankam (H). Sedangkan pengertian vektor dinamik (V), adalah gatra yang terukur dalam besaran dan mempunyai arah (jiwa yang menggerakkan fisik) yaitu ideologi (I) dan politik (P). Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, di daerah maka masalah ideologi dan politik di tingkat lokal selalu memberi arah rujukan, ke suatu sasaran tertentu yang diatur dalam berbagai perundang-undangan di tingkat lokal (daerah). Disamping itu. Unsur-unsur gatra dalam vektor dipengaruhi juga oleh unsur lain sebagai variabel baru, yaitu kemauan dan kemampuan membangun (MMB) serta respons luar negeri (RLn).

Hubungan antara unsur-unsur dalam SM dengan unsur-unsur dalam V disebut Model Momentum yang dianalogikan sebagai massa x kecepatan atau $M \times V$ (Hendrajaya : 2009). Dengan pendekatan ini, merupakan perkalian antara hasil penjumlahan gatra kelompok pertama, dengan hasil penjumlahan kelompok kedua, melambangkan Momentum Ketahanan Nasional di daerah.

Untuk mengukur ketahanan nasional di Provinsi Lampung

menggunakan model momentum dengan rumus sebagai berikut :

$$T = (G + D + SKA + E + S + H) \times (I + P + MMB + RLn)$$

Dimana :

T = Nilai kondisi Tannas suatu wilayah

G = Kondisi ketahanan gatra geografi

D = Kondisi ketahanan gatra demografi

SKA = Kondisi ketahanan gatra sumber kekayaan alam

E = Kondisi ketahanan gatra ekonomi

S = Kondisi ketahanan gatra sosial budaya

H = Kondisi ketahanan gatra pertahanan dan keamanan

I = Kondisi ketahanan gatra ideologi

P = Kondisi ketahanan gatra politik

MMB = Kemampuan dan kemauan untuk membangun

RLn = Respons luar negeri. (Lemhanas RI 2002).

Rumus tersebut menunjukkan bahwa nilai kondisi Tannas di daerah untuk setiap kelompok gatra harus dinormalisasikan terlebih dahulu sebelum dikalikan. Penilaian Kondisi Ketahanan Nasional dilakukan dengan mengevaluasi setiap parameter atau sub parameter yang merupakan kondisi dari wilayah yang ditinjau. Parameter yang digunakan dalam kajian Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung digambarkan pada Tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1 Unsur dan Parameter Pengukuran Tingkat Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung

NO	GATRA	UNSUR	PARAMETER
1.	GEOGRAFI	Wilayah Kesadaran Geografi, Politik dan Strategi	Posisi wilayah Luas Topografi Iklim Daerah inti & daerah khusus Lingkungan hidup
2.	DEMOGRAFI	Kuantitas Penduduk Kualitas Penduduk Mobilitas	Jumlah, struktur & pertumbuhan Kepadatan & penyebaran Kualitas Mobilitas
3.	SUMBER DAYA ALAM	Kekayaan di darat Kekayaan di laut	Bahan makanan Sumber daya mineral, flora & fauna Sumber daya energi Tingkat eksploitasi
4.	EKONOMI	Pertumbuhan ekonomi Pemerataan pendapatan Stabilitas ekonomi	Pertanian Perindustrian Modal Manajemen Daya saing Sarana & prasarana Perdagangan Perikanan Devisa
5.	SOSIAL BUDAYA	Kematangan watak/identitas nasional bangsa Etika dan moral Adat dan kebiasaan	Kerukunan/toleransi & persatuan bangsa Pendidikan nasional Kesehatan Kesadaran hukum Penguasaan & pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi Generasi muda, peran perempuan Disiplin nasional
6.	PERTAHANAN KEAMANAN	Kualitas & kuantitas TNI Kualitas & kuantitas Polri Kesiapan penyelenggaraan	Kesadaran bela negara Kepemimpinan Profesionalisme TNI Profesionalisme Polri Kamtibnas Sishannas

		Hankamnas	Pembinaan Linmas Industri dan prasarana pendukung Sishannas
NO	GATRA/FAKTOR LAIN	UNSUR	PARAMETER
1.	IDEOLOGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila 2. Kewaspadaan terhadap pengaruh ideologi lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghayatan terhadap agama dan kepercayaan 2. Kesadaran berbangsa & bernegara 3. Demokratisasi 4. Kewaspadaan terhadap pengaruh negatif dalam kehidupan beragama 5. Kewaspadaan terhadap pengaruh negatif ideologi asing 6. Kesadaran terhadap pengaruh negatif pada kesadaran berbangsa dan bernegara
2.	POLITIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat 2. Sistem pemerintahan 3. Politik luar negeri / kualitas Diplomasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sismenas (tingkat lokal) 2. Sistem kehidupan politik 3. Otonomi daerah 4. Kualitas pelayanan publik 5. Penegakkan hukum
3.	KEMAUAN DAN KEMAMPUAN MEMBANGUN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran 2. Pengabdian 3. Keterpaduan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi 2. Kesadaran bayar pajak 3. Swadaya pembangunan 4. Keterpaduan pusat dan daerah 5. Keterpaduan supra struktur, infra struktur dan sub struktur
4.	RESPONS LUAR NEGERI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan politik luar negeri 2. Penanaman modal asing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan terhadap pemerintah daerah dan luar negeri 2. Jumlah PMA 3. Embargo 4. Ecolabelling 5. Kartel internasional

Hasil analisis Ketahanan Nasional yang diukur saat ini, dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan Ketahanan Nasional di masa mendatang, sejalan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Penetapan bobot untuk setiap gatra dilakukan dengan menentukan Bobot Maksimal dari Tannas yaitu 100, yang merupakan perkalian dari Bobot Skalar Massif 10 dengan Bobot Vektor Dinamik 10. Pembobotan ditentukan

melalui “perkiraan”, untuk masing-masing gatra dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Provinsi Lampung.

E. PEMBAHASAN KETAHANAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

Kondisi umum Provinsi Lampung dapat diketahui melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif dari aspek Trigatra (Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam) dan Pancagatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan). Kemampuan dan kemauan untuk membangun, serta respons luar negeri.

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

1. Geografi

Parameter yang dianalisis dari gatra geografi adalah posisi (letak), wilayah, luas, bentuk topografi, iklim, daerah inti dan daerah khusus, serta lingkungan hidup.

a. Luas Wilayah

Provinsi Lampung memiliki luas wilayah ± 35.288,35 Km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera. Adapun jumlah penduduk saat ini 7.691.007 jiwa. Provinsi Lampung dibagi menjadi 12 Kabupaten dan 2 kota, bila dihadapkan dengan jumlah kepadatan penduduk saat ini maka potensi luas wilayah masih tergolong luas dan sebagian besar wilayah merupakan wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan baik dalam

bentuk eksploitasi pertanian, perkebunan dan perikanan maupun pertambangan.

Bila luas wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk Lampung (35.288,35 km² : 7.691.007), maka nilai luas wilayah masih tinggi karena ruang mata pencaharian penduduk masih memungkinkan untuk dikembangkan secara optimal. Kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 75.

b. Bentuk Topografi

Provinsi Lampung terbagi dalam beberapa bentuk daratan yaitu, kelompok topografis berbukit-bukit sampai bergunung-gunung. Daerah ini meliputi punggung-punggung Bukit Barisan, di bagian pantai Barat Lampung. Vegetasi daerah ini disebabkan kondisi tersebut, umumnya diselimuti oleh hutan primer dan sekunder yang menghijau sepanjang tahun. Kelompok ini adalah daerah perbukitan rendah dan dataran sempit dengan ketinggian 300-500 meter dari permukaan laut, terbentang di bagian Barat Kabupaten Lampung Selatan.

d. Iklim

Lampung mempunyai dua musim setiap tahunnya dan dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 80,88 %. Pada bulan November sampai Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut. Sedangkan pada bulan Juli sampai Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Suhu Udara daerah Lampung pada daerah dataran dengan ketinggian 30 - 60 meter rata-rata berkisar antara 26-28 derajat Celcius untuk suhu maksimum dan yang jarang dialami adalah suhu 33 derajat Celcius dan juga minimum 22 derajat Celcius.

e. Daerah Inti/Daerah Khusus

Daerah hutan khususnya Taman Nasional Way Kambas, terletak di timur Propinsi Lampung dan berjarak sekitar 112 km dari Kota Bandarlampung. Taman Nasional Way (sungai) Kambas ini pertama kali diresmikan oleh Menteri Pertanian tahun 1982. Dengan luas \pm 130.000 ha, tempat ini tidak hanya dihuni gajah-gajah sumatera (*Elephas maximus*), tapi juga merupakan habitat bagi badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) dan beberapa hewan dilindungi lainnya. Dalam kawasan Way Kambas terdapat Suaka Rhino Sumatera (*Sumateran Rhino Sanctuary*), lokasi ini merupakan Proyek Penelitian Pembangunan Populasi Badak Sumatera di habitat aslinya serta penelitian Populasi Harimau Sumatera.

Kawasan ini merupakan objek wisata sekaligus sebagai paru-paru dunia, tentunya akan memiliki nilai-nilai ekonomi apabila kawasan konservasi dikelola dengan baik dan serius serta akan mendatangkan efek ganda yang sangat besar bagi daerah. Kunjungan dan daya tarik masyarakat dunia untuk datang ke Lampung menyaksikan sejumlah antraksi wisata alam dan laut ini akan memberikan efek ganda ke sektor lain terutama jasa transportasi hotel dan restoran yang kesemuanya menjadi PAD Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Povinsi Lampung. Keindahan alam di Provinsi Lampung telah mengundang para investor dari luar untuk menanamkan modal dalam mengembangkan pariwisata di daerah ini. Kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

2. Lingkungan Hidup

Pemerintah Propinsi Lampung telah berupaya untuk mengatasi

permasalahan lingkungan hidup yang terjadi salah satunya dengan membuat lubang resapan biopori. Sejak tahun 2012 pembuatan lubang resapan biopori tersebut sudah dilakukan, begitu juga di tahun 2013 dan diharapkan di tahun 2015, akan meningkat lagi jumlahnya. Lubang resapan biopori ini juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi melalui kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat.

Kemudian masalah sampah juga menjadi salah satu problem tersendiri bagi masyarakat perkotaan, padahal sampah merupakan salah potensi yang bisa dikembangkan bukan hanya untuk kerajinan tangan namun bisa menjadi sumber energy listrik. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2012 penduduk kota Bandar lampung menghasilkan sampah perhari sebanyak 8 ribu meter kubik dan hanya 68% yang baru bisa dikelola. Hal ini jika tidak dapat disikapi dan diolah dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan, padahal sampah berpotensi menjadi energy baru. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 70.

3. Demografi

a. Jumlah dan Struktur Pertumbuhan
Berdasarkan data dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, jumlah penduduk Propinsi Lampung adalah 7.691.007 orang, yang terdiri atas 3.964.479 laki-laki dan 3.726.528 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Lampung per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,35 persen, lebih rendah dari pertumbuhan penduduk nasional yaitu 1,49 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang adalah yang tertinggi dibandingkan

kabupaten/kota yang lain di Lampung yakni sebesar 2,69 persen disusul Kota Metro sebesar 2,08 persen.

b. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Bila dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Bandar Lampung yakni sebanyak 4.619 jiwa per Km² dan yang paling rendah adalah Kabupaten Lampung Barat dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 85 jiwa per Km². Kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 70

c. Kualitas Penduduk

Potensi ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk khususnya di daerah. Kualitas pendidikan penduduk yang ada di daerah sebagian besar masih terbatas pada tingkat dasar yang belum mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut menyebabkan penguasaan terhadap Iptek masih rendah.

d. Penyebaran dan Mobilitas

Distribusi penduduk Provinsi Lampung bervariasi menurut kabupaten/ kota. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kota Metro 145.471 jiwa (1,91 persen) sedangkan jumlah penduduk paling terdapat di Kabupaten Lampung Tengah 1.170.717 jiwa (15,39 persen). Namun jika dikaji berdasarkan kepadatan penduduknya, Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah yang paling jarang penduduknya yaitu 85 jiwa/ Km² sedangkan wilayah yang paling padat adalah wilayah Kota Bandar Lampung, yaitu 4.597 jiwa/ Km². Kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 65.

4. Sumber kekayaan Alam.

a. Bahan Makanan

Di Propinsi Lampung sektor pertanian masih merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan sumbangan sebesar 36,8 % dari total PDRB Provinsi Lampung. Sejumlah keunggulan Provinsi Lampung yang merupakan representasi pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Lampung antara lain : sebagai produsen gula pasir yang memasok sampai 35 % produksi nasional, produsen tapioka 60 % dari produksi nasional, produsen nenas kaleng 26 % pemasok kebutuhan dunia, pengeksportir udang ke USA dan Jepang (terbesar di Indonesia).

b. Bahan Mineral, Flora dan Fauna.

Propinsi Lampung memiliki kawasan hutan mencapai 1.004.735 ha atau sekitar 30,43 % dari luas wilayah propinsi, terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata taman nasional 462.030 ha, hutan produksi terbatas 33.358 ha dan hutan produksi tetap 91.732 ha. Dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, produksi kehutanan kini lebih diarahkan kepada hasil hutan non kayu dan potensi ekowisatanya. Hasil hutan pada 2012 berupa kayu bulat sebanyak 452.793,33 m³, kayu gergajian 8.500,40 m³ dan kayu lapis 33.313,08 m³. Sedangkan produksi hasil hutan non kayu berupa damar mata kucing sebanyak 6.500,28 ribu ton, dan getah karet 19.403,35 ribu ton.

c. Sumber Energi.

Potensi energi seperti panas bumi yang berlokasi di daerah Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, mencapai 400 MW. Di Suoh, Kabupaten Lampung Barat, potensi tersebut mencapai 300 MW. Semua

potensi itu telah di eksplorasi oleh Pertamina sebesar 110 MW. Lampung juga mempunyai potensi air untuk pembangkit tenaga listrik yang juga sangat besar. Pada SWS Way Semangka Upper tersedia kapasitas sebesar 78 MW dan telah dioperasikan melalui PLTA Besai dan PLTA Batu Tegi. Pada SWS Way Semangka Lower dan Way Semung masing-masing tersedia potensi sebesar 76 MW dan 2,6 MW. Kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

d. Tingkat Eksploitasi

Eksploitasi sumberdaya alam di provinsi Lampung meliputi pertambangan batu bara oleh perusahaan asing, namun eksploitasi ini tidak memberikan dampak yang luas terhadap kesejahteraan rakyat karena masyarakat dan pemerintah tidak memiliki akses mengendalikan perusahaan tersebut. Dibandingkan dengan potensi Sumber Daya Alam yang tersedia, tingkat eksploitasi di Lampung sampai dengan tahun 2013 masih rendah. Hal ini disebabkan karena penanam modal yang berminat masih kurang disamping kemampuan teknologi dan sumber daya manusia yang masih terbatas. Kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 75.

5. Ideologi

a. Penghayatan agama dan Kepercayaan.

Dari data yang teridentifikasi dapat disimpulkan bahwa penghayatan agama di wilayah Provinsi Lampung menunjukkan tingkat yang kondusif dan tangguh, khususnya karena peran tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Demikian pula penyakit masyarakat seperti narkoba, pelacuran, minuman keras, serta korupsi relatif rendah

kecuali pencurian. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara

Provinsi Lampung menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui Pendidikan Kewarganegaraan, yang berintikan kebajikan atau akhlak kewarganegaraan. Kebajikan itu terpancar dari nilai-nilai Pancasila yang secara substantif mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan yang plural baik multikultural maupun multietnik. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan masyarakat madani yang multikultural dan multietnik berdasarkan Pancasila. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 70.

c. Demokratisasi.

Pelaksanaan demokrasi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung pada tahun 2014 ini, jauh dari euphoria reformasi yang marak dengan anarkhis. Provinsi Lampung telah berhasil menjalankan sukseksi kepemimpinan daerah secara demokratis dengan terpilihnya Gubernur termuda di Indonesia. (M.Ridho Ficardho) proses politik yang demokratis tersebut menunjukkan kehidupan demokrasi di tingkat lokal dapat berjalan dengan baik, dan tidak ditemukan terjadinya anarkis. Kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

- d. Tingkat kewaspadaan terhadap pengaruh negatif dalam kehidupan agama dan kepercayaan.

Provinsi Lampung dikatakan relatif aman, sebagai provinsi yang agamis, Provinsi Lampung dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan puluhan aliran kepercayaan dengan pemahaman dan toleransi kehidupan keagamaan yang tinggi merupakan fondamen yang kuat untuk menangkal penyimpangan, hal tersebut yang tidak lepas dari peran Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Lembaga Keagamaan dan peran masyarakat sendiri serta lembaga pendidikan serta organisasi Islam yang ada di Lampung. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

- e. Tingkat kewaspadaan terhadap pengaruh negatif ideologi lain.

Tingkat kewaspadaan terhadap pengaruh negatif ideologi lain di Provinsi Lampung ini tidak bisa terlepas dari peran Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, TNI, Polri dan partisipasi masyarakat, tentang pemahaman untuk kembali menyegarkan pikiran bahwa eksistensi Pancasila sebagai ideologi Negara merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan dalam suatu kenyataan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 75.

- f. Kesadaran terhadap pengaruh negatif kesadaran berbangsa dan bernegara

Peran pemerintah Provinsi Lampung dalam peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara, bekerjasama dengan instansi terkait seperti TNI yang ada di wilayah Lampung, seperti adanya kegiatan TMMD yang menghasilkan sinergi cukup besar antara rakyat (masyarakat) dengan TNI selaku penjaga keutuhan wilayah NKRI. Diharapkan melalui kegiatan TMMD dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta memantapkan rasa persatuan dan kesatuan. Dengan terciptanya persatuan dan kesatuan maka akan menjadi kekuatan strategis yang ampuh dalam mengatasi segala bentuk tantangan serta ancaman konflik baik vertikal mau pun horizontal. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 85.

6. Politik

a. Sistem Manajemen Nasional

Faktor kritis terkait dengan sistem manajemen nasional di Provinsi Lampung adalah komunikasi dan koordinasi antar komponen dalam masing-masing struktur, yaitu suprastruktur, infrastruktur dan substruktur, serta komunikasi dan koordinasi antar struktur. Komunikasi dan koordinasi antar komponen pada masing-masing struktur sudah berlangsung dengan baik. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

b. Sistem Kehidupan Politik

Pola sistem politik dan penyelenggaraan pemerintahan ini relatif berjalan dengan baik

sehingga intrik antar lembaga nyaris tidak ada, bahkan terjalin sinergitas antar lembaga. Diharapkan dengan pola tersebut di atas akan mewujudkan *good governance* dan memperkuat kesadaran politik bagi seluruh aparat pemerintahan khususnya dan masyarakat Lampung umumnya. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

c. Penerapan Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang digulirkan sejak tahun 2001 tampaknya belum mampu mendorong kemajuan bagi Provinsi Lampung. Selain problem politik dan birokrasi, minimnya kualitas sumber daya manusia juga menyebabkan Lampung masih relatif tertinggal. Pembangunan infrastruktur dan kondisi perekonomian merupakan dua prioritas persoalan yang dinilai paling menghambat gerak pembangunan Lampung.

Identifikasi yang dilakukan sejumlah pengamat menyebutkan, wilayah pemekaran belum bisa berkembang lantaran tidak dapat memfokuskan pada sumber daya alam yang tersisa setelah pemekaran dan aparat pemerintah yang kurang jeli mengembangkan potensi wilayah. Sebaliknya, wilayah yang relatif cukup berhasil, seperti Kota Metro, karena sudah memiliki tata ruang infrastruktur peninggalan Belanda dan sumber daya manusia. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 70.

d. Kualitas Pelayanan Publik

Penelitian Ombudsman beberapa waktu lalu yang dipublikasikan di media massa lokal menyebutkan bahwa kualitas pelayanan publik di provinsi Lampung dan beberapa

kabupaten/kota tergolong buruk, hal ini tentunya akan berdampak pada perkembangan investasi di Lampung yang nantinya akan membawa dampak bagi ketahanan daerah provinsi Lampung. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik juga, perlu adanya *reward and punishment* sesuai prestasi lembaga publik yang disurvei. Hal ini perlu dilakukan kepada para kepala daerah, agar mereka bisa kerja dengan baik, dan merasa diawasi. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

e. Penegakkan Hukum

Salah satu metode penegakan hukum, adalah dengan penindakan bagi yang melanggar hukum. Penegakan hukum dan HAM serta perwujudan pemerintahan yang bersih dan baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang bertitik berat pada peningkatan pengawasan internal-eksternal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dengan cara *social control* yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat secara langsung atau pun tidak langsung. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 85

7. Ekonomi

Untuk mengukur ketahanan ekonomi dari aspek gatra ekonomi akan dilihat dari 9 (sembilan) parameter yaitu :

a. Pertanian

Produksi komoditas perkebunan terbesar di Lampung adalah tebu yang mencapai 744.212 ton, dimana produksi tebu terbesar dihasilkan oleh perkebunan swasta (85,33%) selain tebu, kopi merupakan komoditas andalan diprovinsi Lampung, hal ini diperkuat dengan

besarnya produksi kopi, 2013 mencapai 144.803 ton, dimana Lampung Barat merupakan penghasil kopi terbesar yaitu sekitar 41% dari total produksi di provinsi Lampung.

Di sektor perikanan, pemerintah daerah Provinsi Lampung Sedang menggalakkan budi daya pengembangan ikan laut, di Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin, merupakan tempat penelitian terhadap pengembangan jenis ikan laut yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi seperti jenis napoleon, kerapu bebek, kakap, udang dan biota laut seperti kuda laut, tiram, kima. Disamping itu daya saing kelapa sawit cukup kuat karena Provinsi Lampung akan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit. Sektor pertanian di Provinsi Lampung tergolong "*labor intensive*" sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Terlebih lagi dengan adanya program pemberdayaan budidaya ikan di Provinsi Lampung yang sangat padat karya, sehingga dalam tahun 2013 Provinsi Lampung mampu menekan angka pengangguran di wilayahnya. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 85.

b. Perindustrian

Jumlah perusahaan industri besar/ sedang di propinsi lampung tahun 2013 berjumlah 268 perusahaan. kemudian industri karet dan barang-barang dari plastik (KBLI 22) yang menyerap pekerja 4.170 orang (6,1 persen). Kebutuhan listrik Provinsi Lampung sebagian besar disuplai oleh PT. PLN

(Persero) wilayah lampung. Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan maka daya tersambung, produksi listrik dan listrik yang terjual juga semakin meningkat. Produksi listrik tahun 2012 mencapai 2.793.359 MWh naik 15,14 persen dibanding tahun 2011. Potensi pertambangan di provinsi lampung tersebar diseluruh kabupaten/kota. Potensi ini merupakan kekayaan alam yang harus digunakan sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

c. Modal

Perkembangan realisasi investasi PMA Provinsi Lampung dalam tiga tahun terakhir (2010-2012) meningkat, nilai investasi PMA tahun 2012 tercatat sekitar 114,32 juta US\$ meningkat dibandingkan tahun 2011 (79,50 juta US\$) atau sekitar 0,41 persen dari total PMA nasional dengan jumlah proyek sebanyak 54 proyek. Sementara untuk perkembangan nilai investasi PMDN tahun 2012 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu nilai investasi PMDN tahun 2012 mencapai 304,23 miliar rupiah menurun dari nilai PMDN 2011 (824,43 miliar rupiah). Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 75.

d. Manajemen

Berkaitan dengan penyelenggaraan *Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik, Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung memiliki

komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas kompetensi dan pen-dayagunaan aparatur Pemerintah Daerah. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kelompok masyarakat di perdesaan dengan mengem-bangkan potensi melalui kegiatan fasilitasi, pendam-pingan, bantuan stimulan modal usaha, pembangunan infra-struktur dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) yang murah dan mudah, dengan tetap mengedepankan pola keswadayaan dan kemandirian. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 77.

e. Daya Saing

Untuk meningkatkan perdagangan di Provinsi Lampung telah ditempuh upaya peningkatan daya saing produk melalui peningkatan akses dan penetrasi pasar, pengembangan desain dan merek dagang, pengembangan sarana dan prasarana pasar secara modern, perkuatan kelembagaan usaha perdagangan, efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis serta menggerakkan sektor riil guna memperkuat pasar domestik, selain itu peningkatan kualitas dan daya saing produk melalui stimulasi bantuan peralatan bagi masyarakat UMKM dan koperasi yang ada di Provinsi Lampung. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 70.

f. Sarana dan Prasarana

Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya tahun 2013 di Provinsi Lampung mencapai 3499,3 km, yang terdiri dari jalan Nasional sepanjang 1159,57 km, jalan Provinsi sepanjang 2339,73 km. Kondisi jalan nasional dalam keadaan baik sebesar 26 %. Kondisi sedang 57 % kondisi rusak 10 %, kritis 7 %. (Bappeda Propinsi Lampung 2014). Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (*Road Density*), kerapatan jalan di Provinsi Lampung sebesar 0,43. Km/Km² lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional (0,23 Km/Km²). Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 85.

g. Perdagangan

Berdasarkan data yang dikumpulkan BPS tahun 2012 volume ekspor provinsi Lampung 8.414.044 ton dibandingkan tahun 2011 (7.001.487 ton) mengalami kenaikan 21,17 persen. Negara tujuan ekspor terbesar adalah Amerika Serikat dengan nilai US \$ 403.784.277 disusul negara Italia US \$ 401.552.819. Volume impor provinsi Lampung pun mengalami peningkatan yaitu dari 3.556.622 ton pada tahun 2011 menjadi 3.612.794 ton atau naik 1,6 persen. Nilai impor pun mengalami peningkatan dari US \$ 2.907 juta pada tahun 2011 menjadi US \$ 3.250 juta pada tahun 2012 naik 11,80 persen. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 70.

h. Moneter

PDRB Provinsi Lampung menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

dengan migas tahun 2012 mencapai 144.561 miliar rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB ADHB dengan migas Provinsi Lampung 2,51 menyumbang sebesar 14,88 persen terhadap PDB nasional (33 provinsi). Sementara untuk PDRB ADHK tahun 2012 dengan migas sebesar 43.506 miliar rupiah, sementara tanpa migas sebesar 43.111 miliar rupiah. Struktur perekonomian Provinsi Lampung tahun 2012, didominasi bersarnya kontribusi dari sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 36.05%, sektor Industri Pengolahan (16.01%), dan sektor perdagangan (15.91%) sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 30,00 %, sektor industri pengolahan (27,13%), dan sektor pertanian (15,39%). Selain ketiga sektor diatas, sektor lainnya yang memiliki kontribusi cukup besar adalah sektor jasa (8,79%), dan sektor pengangkutan dan komunikasi (11,47%). Jika dilihat perbandingan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas 2011 di Provinsi Lampung, menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi, dimana PDRB tertinggi mencapai 19.357 miliar rupiah (Lampung Tengah) dan PDRB terendah sebesar 1.320 miliar rupiah (Kota Metro). Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

i. Devisa

Perkembangan devisa menunjukkan nilai positif dengan neraca perdagangan

Provinsi Lampung 2012 di pasar internasional mengalami surplus. Objek wisata laut dan alam yang ada di Provinsi Lampung juga memberikan sumbangsih yang besar terhadap penghasilan devisa. Disamping itu tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Lampung yang selama ini bekerja di luar negeri mampu menghasilkan devisa juga tidak kalah banyak untuk pemerintah Provinsi Lampung. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 75

8. Sosial Budaya

a. Kerukunan/Toleransi dan Persatuan Bangsa

Propinsi Lampung dihuni oleh warga masyarakat berbagai etnis, dalam kehidupan sehari-hari antar warga tersebut terjalin kerukunan dengan sebaik-baiknya, namun terkadang muncul unjuk rasa yang pada dasarnya merugikan kehidupannya dan menuntut keadilan dan kesejahteraan. Disamping itu ditumpangi nuansa politik dalam batas-batas yang masih dapat ditoleransi. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 77.

b. Pendidikan Nasional

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Lampung dari tahun 2008-2013 membaik. AMH tahun 2012 mencapai 95.02 persen dan lebih tinggi dari rata-rata AMH nasional (92,99%), dengan AMH tertinggi di Kota Bandar Lampung (98.47%) dan terendah di Tulang Bawang Barat (93.03%). Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

c. Kesehatan

Perkembangan status gizi balita Tahun 2012 untuk persentase balita gizi buruk (3.5%), balita gizi kurang (10.0%), dan balita kekurangan gizi (13.5%) menunjukkan perbaikan dibandingkan kondisi tahun 2010 dan kondisi tersebut berada dibawah rata-rata nasional. Angka Harapan Hidup (AHH), Provinsi Lampung dalam lima tahun terakhir meningkat dan AHH kabupaten / kota berdasarkan estimasi rata-rata menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perkembangan AHH secara nasional. AHH Provinsi Lampung tahun 2012 mencapai 69.75 tahun lebih tinggi dibandingkan terhadap AHH nasional. Sementara untuk perbandingan AHH antar kabupaten / kota di Provinsi Lampung, AHH tertinggi berada di Kota Metro sebesar 72.76 tahun lebih tinggi dari AHH provinsi dan nasional, dan terendah di Lampung Barat (67.45 tahun). Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 85.

d. Kesadaran Hukum

Program peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di wilayah Provinsi Lampung dilakukan dengan kegiatan yang difokuskan kepada kegiatan sosialisasi produk-produk hukum, peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM) Koordinasi antar lembaga dalam bidang bantuan hukum (LBH-LBH), inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), pembinaan masyarakat pelanggar Peraturan Daerah (Perda), peningkatan peran aparatur

pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda), dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda). Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 75.

e. Penguasaan dan Pengembangan IPTEK

Penguasaan dan pemanfaatan iptek belum optimal di Provinsi Lampung, hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya iptek yang ada. Melihat perkembangan tersebut maka penguasaan dan pengembangan teknologi IPTEK kedepan akan lebih maju bila didukung oleh sumber daya teknologi dan peralatan yang memadai. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup tangguh dengan nilai 70.

f. Peranan Generasi Muda dan Peranan Wanita

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih dihadapkan pada permasalahan kesenjangan gender di berbagai urusan pembangunan antara lain pendidikan, tenaga kerja, politik serta hukum dan HAM. Kemudian dalam hal peranan generasi muda di Lampung, partisipasi pemuda sebagai salah satu komponen penting dalam masyarakat cukup memadai, hal ini bisa dilihat dari berdirinya organisasi pemuda, setidaknya ada beberapa organisasi pemuda yang eksis di Lampung seperti KNPI, Ikatan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Forum Bersama Pemuda Cinta Bangsa. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 75.

g. Disiplin Nasional

Disiplin nasional dapat diukur dari kinerja aparat birokrasi pemerintahan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku. Masih tingginya angka tindak pidana umum, korupsi, kurang patuhnya masyarakat terhadap ketentuan hukum, serta inkonsistensi penegak hukum dalam menjalankan tugas menunjukkan masih lemahnya tingkat disiplin nasional di provinsi Lampung. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup tangguh dengan nilai 68

9. Pertahanan dan Keamanan

a. Kesadaran Bela Negara

Kesadaran bela negara masyarakat cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan adanya pelajaran kewarganegaraan dan UUD 1945 mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Namun, tingkat implementasinya belum optimal. Di samping itu masalah pertahanan didukung oleh 1 (satu) Korem, 10 (sepuluh) Kodim, 1 Yonif dan sejumlah Koramil. Unsur TNI – AL untuk tugas keamanan laut, yang berkedudukan di provinsi Lampung setingkat POSAL. Unsur Polri adalah Kepolisian Daerah Lampung yang membawahi 1 Poltabes dan 9 Polresta. Perimbangan jumlah penduduk dan polisi 441 : 1. Kondisi ini masih kurang jika di banding dengan luas daerah dan kualitas peralatan Polri. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 75.

b. Kepemimpinan

Koordinasi kepemimpinan di provinsi Lampung sudah terjalin dengan baik dengan adanya komunikasi yang harmonis antar unsur Muspida. Kualitas kepemim-

pinan yang baik tersebut memperkuat kewibawaan pemerintah sehingga stabilitas politik dapat dipelihara dengan baik. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 82

c. Profesionalisme TNI

TNI merupakan salah satu aparaturnegara yang mempunyai tugas mempertahankan negara dari ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan yang datang dari luar atau dari dalam baik langsung maupun tidak langsung untuk keamanan dan ketertiban bangsa melalui ketahanan nasional. Selain itu, Profesionalisme TNI diwujudkan dalam komitmen untuk melepaskan diri dari kegiatan politik praktis, keterlibatan dalam kegiatan bisnis serta memusatkan diri pada tugas-tugas pertahanan dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

d. Profesionalisme Polri

Ditinjau dari segi keterampilan, Profesionalisme Polri di lingkungan Polda Lampung cukup baik hal ini dapat dilihat dalam beberapa keberhasilan pelaksanaan tugas seperti penangkapan gembong perampok, curanmor, penangkapan terorisme, dan berbagai tugas lainnya. Namun dari segi sikap profesionalisme dalam pelaksanaan tugas masih ada penilaian miring atas perilaku anggota polisi dalam pelaksanaan tugas sebagai inti kekuatan Kamtibmas selama ini. Berbagai kasus yang dilakukan anggota Polisi, salah tangkap, tindakan main hakim sendiri, penembakan warga masyarakat, dan kasus-kasus arogansi oknum kepolisian di

jalanan, membacking tindakan kejahatan, menunjukkan profesionalisme Polri belum mampu ditunjukkan dengan maksimal. Kasus oknum polisi yang melakukan “tilang” (bukti pelanggaran) terhadap pengendara bermotor dengan delik pelanggaran, kemudian dilakukan “damai” dengan memberi uang kepada petugas Polisi Lalu Lintas, misalnya, adalah etalase citra buruk polisi yang belum bisa terhapus sampai saat ini. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 75.

e. Kamtibmas

Gangguan kamtibmas di Lampung pernah meningkat akibat adanya ketimpangan didalam masyarakat. Hal ini mudah sekali memicu terjadinya konflik antar wilayah dilampung, termasuk di dalamnya kasus Register 45 Mesuji, Balinuraga dan Jatimulyo. Salah satu badan di daerah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang berperan mendeteksi gangguan kamtibmas. Kominda merupakan satu komunitas lintas sektoral yang antara lain bertugas menjaring informasi, mengolah untuk meneruskannya ke induk lembaga anggota seperti Kodam, Polda, Beacukai, Imigrasi, Kesbangpol Linmas, Kejaksaan, termasuk juga kepada wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota.

Pemerintah Provinsi Lampung juga membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013, dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/ 379/ III.17/ HK/ 2013. ini sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 300/4579/SJ, tentang Pencegahan Dan Penanganan Konflik antar Warga atau antar Kelom-

pok masyarakat. Provinsi Lampung telah menyusun 34 rencana aksi daerah 2013 serta dilaporkan kepada Kemenko Polhukam bersama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pembangunan (UKP4) untuk dilakukan evaluasi. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 70

f. Sishannas

Sishannas di Koordinasikan oleh Kodam II/Sriwijaya selaku Kompartemen strategis Perhahanan di daerah, Kekuatan TNI sebagai unsur kekuatan utama terdiri dari Unsur darat dari Kodam II/Sriwijaya, Unsur laut dari lanal Lampung dan unsur udara dari lanud Astra Ksetra dan dibantu oleh unsur kamtibmas dari Polda Lampung serta didukung oleh komponen cadangan dan pendukung sumber daya manusia dan sumber daya alam yang telah dikoordinasikan dan disiapkan melalui kegiatan pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 75

g. Pembinaan Linmas

Perwujudan Linmas ini yang sesuai dengan makna dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 sampai sekarang belum sepenuhnya dapat terlaksana. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari pengelola dan pelaku pembangunan yang memiliki peran dan tugas sangat strategis, khususnya dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Utamanya yang berkaitan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengamanan asset, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta pengendalian tata ruang wilayah. Kinerja Satpol PP sebagai bagian integral

dan penentu keberhasilan pembangunan terus dipacu dan diharapkan bisa saling bersinergi dalam penegakan Perda antar wilayah atau antar Kabupaten.

Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 77.

h. Industri dan Prasarana Pendukung Sishannas

Dihadapkan dengan ketahanan daerah Provinsi Lampung Industri dan Prasarana pendukung Sishannas yang berkaitan dengan alutsista di koordinasikan oleh TNI secara terpusat, namun pemanfaatan Industri dan sarana yang ada di provinsi Lampung lebih diarahkan kepada dukungan logistik wilayah. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup tangguh dengan nilai 67.

10. Kemauan dan Kemampuan Membangun

a. Partisipasi Pembangunan

Kesadaran masyarakat Lampung untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional di wilayahnya cukup positif, *Cooperate social responsibility* yang belum berjalan sebagaimana mestinya disamping melihat krisis global Provinsi Lampung sangat signifikan terhadap pengaruh tersebut. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

b. Kesadaran Membayar Pajak

Realisasi bagi hasil pajak penghasilan (PPh) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri Provinsi Lampung tahun anggaran 2013 mencapai Rp 175,4 miliar. Bagi hasil PPh kali ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang terealisasi

Rp143,5 miliar. Kenaikan realisasi pada dua tahun terakhir, ternyata untuk PPh Pasal 21 mengalami kenaikan 10,68 persen, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri justru mengalami penurunan 5,27 persen. Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kewenangan pemungutannya sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota. Kondisi demikian dikategorikan Tangguh dengan nilai 75.

c. Swadaya Pembangunan

Kesadaran akan peningkatan pembangunan secara fisik di Provinsi Lampung melalui swadaya pembangunan sangat mengesankan, dimana masyarakat turut berpartisipasi dalam membantu proses pembangunan melalui swadaya masyarakat murni dan bantuan dari pihak-pihak yang menjadi sponsor pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

d. Keterpaduan Pusat dan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Lampung yang masih menyesuaikan dengan platform Pemerintah Pusat. Selain itu pemerintah Provinsi

Lampung beberapa waktu yang lalu telah berupaya menjaring aspirasi dari seluruh komponen masyarakat Lampung, maupun dari luar Lampung yang terdiri dari kalangan perguruan tinggi, kaum cendekiawan pelaku dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan di provinsi ini untuk menyusun strategi pembangunan jangka menengah di provinsi Lampung. Disamping itu telah dilaksanakan koordinasi dan menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam melaksanakan dekonsentrasi dan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah Provinsi. Kemudian meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah. Kondisi demikian dikategorikan Tangguh dengan nilai 80.

e. Keterpaduan Supra, Infra dan Substruktur

Pelaksanaan

pembangunan di provinsi Lampung tetap dalam koordinasi secara terpadu antara Supra Struktur (DPRA dan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, Instansi perwakilan pusat) yang berperan sebagai subyek dalam implementasi kebijakan pembangunan, terutama pembuatan peraturan dan perundang-undangan dan pengambilan kebijakan program pemerintah. Sedangkan Infra Struktur, (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh partai politik dan LSM) yang berbaur dengan masyarakat yang turut berperan dalam pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah serta Sub Struktur (segenap lapisan mas-

asyarakat) yang terlibat langsung dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 75.

11. Respons Luar Negeri

a. Dukungan terhadap Pemerintahan Daerah dari Luar Negeri

Dukungan internasional kepada provinsi Lampung dilaksanakan melalui program kerjasama luar negeri dengan misi pendidikan, alih teknologi dan promosi daerah serta pemasaran hasil produksi. Secara garis besar kerjasama meliputi bidang ekonomi, perdagangan, industri, investasi, pariwisata, Iptek, pendidikan/pelatihan, kebudayaan & lingkungan hidup. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

b. Jumlah Penanaman Modal Asing.

Berdasarkan data Lampung Dalam Angka Tahun 2013 yang bersumber dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung bahwa, proyek – proyek Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah disetujui Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan beberapa sektor mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar 143.146.659 US \$ dari 10 proyek yang disetujui meningkat pada tahun 2011 menjadi 827.889.065 US \$ dari 58 proyek yang disetujui. Kondisi demikian dikategorikan Tangguh dengan nilai 80.

c. Embargo

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam bidang kerjasama dengan Luar Negeri di

bidang ekonomi sudah cukup baik. Hal ini terlihat selama ini Provinsi Lampung tidak pernah mengalami pemutusan hubungan perdagangan (embargo) yang dilakukan negara lain terhadap Provinsi Lampung, hal ini disebabkan oleh faktor stabilitas dan keamanan daerah Provinsi Lampung yang cukup kondusif. Kondisi demikian dikategorikan Cukup Tangguh dengan nilai 70.

d. Ecolabelling
Kopi identik dengan urat nadi ekonomi di Provinsi Lampung. Buktinya adalah lebih dari satu dasawarsa ini, kopi di urutan pertama dari 10 komoditas ekspor Lampung. Selain itu didukung oleh lahan seluas 274.498 hektar, yang seluruhnya dibudidayakan petani atau rakyat. Kopi di urutan pertama dari 10 komoditas ekspor. Kopi Lampung menyum-

bang 60-70 persen penerimaan devisa kopi nasional. Di Lampung sendiri, kopi adalah komoditas andalan pertama yang setiap tahun menyumbang devisa lebih 40 persen. Kondisi demikian dikategorikan Tangguh dengan nilai 75.

12. Kondisi Ketahanan Nasional Provinsi

Dari hasil analisis Astagatra serta faktor kemampuan dan kemauan membangun serta faktor respon luar negeri masing-masing dihitung sesuai dengan bobot yang diberikan akan didapat nilai skor. Selanjutnya masing-masing skor akan dihitung dengan rumus Model Lemhanas III (Hendrajaya, 2009). Di bawah ini terdapat beberapa tabel Penilaian Ketahanan Nasional di Propinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel-1 : Ketahanan Gatra Geografi

NO	PARAMETER	BOBOT	NILAI		SKOR *)
			KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	Posisi wilayah	0,15	Tangguh	80	0,120
2.	Luas	0,20	Tangguh	75	0,150
3.	Bentuk/topografi	0,15	Tangguh	85	0,128
4.	Iklim	0,15	Tangguh	80	0,120
5.	Daerah inti/khusus	0,15	Tangguh	80	0,120
6.	Lingkungan hidup	0,20	Cukup Tangguh	70	0,140
	Jumlah	1,00			0,778

$$*) \text{ SKOR} = \frac{\text{bobot parameter} \times \text{nilai kuantitatif parameter}}{100}$$

Tabel-2 : Ketahanan Gatra Demografi

NO	PARAMETER	BOBOT	NILAI		SKOR *)
			KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	Struktur, jumlah, pertumbuhan	0,20	Cukup Tangguh	65	0,130
2.	Kepadatan dan persebaran	0,20	Cukup Tangguh	70	0,140
3.	Kualitas / ketrampilan / keuletan/kemandirian	0,35	Cukup Tangguh	65	0,228
4.	Penyebaran dan mobilitas	0,25	Cukup Tangguh	65	0,163
	Jumlah	1,00			0,660

$$*) \text{SKOR} = \frac{\text{bobot parameter} \times \text{nilai kuantitatif parameter}}{100}$$

Tabel-3 : Ketahanan Gatra Sumber Kekayaan Alam

NO	PARAMETER	BOBOT	NILAI		SKOR *)
			KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	Bahan makanan	0,20	Tangguh Sekali	90	0,180
2.	Sumberdaya mineral, flora fauna	0,20	Tangguh Sekali	90	0,180
3.	Sumberdaya energy	0,30	Tangguh	80	0,240
4.	Tingkat eksploitasi	0,30	Tangguh	75	0,225
	Jumlah	1,00			0,825

$$*) \text{SKOR} = \frac{\text{bobot parameter} \times \text{nilai kuantitatif parameter}}{100}$$

Tabel-4 : Ketahanan Gatra Ekonomi

NO	PARAMETER	BOBOT	NILAI		SKOR *)
			KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	Pertanian	0,60	Tangguh	85	0,510
2.	Perindustrian	0,20	Tangguh	80	0,160
3.	Modal	0,35	Tangguh	75	0,263
4.	Manajemen	0,30	Tangguh	77	0,231
5.	Daya Saing	0,35	Cukup Tangguh	70	0,245
6.	Sarana prasarana	0,35	Tangguh	85	0,298
7.	Perdagangan	0,45	Cukup Tangguh	70	0,315
8.	Moneter	0,20	Tangguh	80	0,160
9.	Devisa	0,20	Tangguh	75	0,150
	Jumlah	3,00			2,331

$$*) \text{SKOR} = \frac{\text{bobot parameter} \times \text{nilai kuantitatif parameter}}{100}$$

Tabel-5 : Ketahanan Gatra Sosial Budaya

NO	PARAMETER	BOBOT	NILAI		SKOR *)
			KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	Kerukunan/toleransi dan persatuan bangsa	0,30	Tangguh	77	0,231
2.	Pendidikan nasional	0,25	Tangguh	80	0,200
3.	Kesehatan	0,20	Tangguh	85	0,170
4.	Kesadaran hukum	0,45	Tangguh	75	0,338
5.	Penguasaan & pengembangan Iptek	0,30	Cukup Tangguh	70	0,210
6.	Generasi muda, peran perempuan	0,20	Tangguh	75	0,150
7.	Disiplin nasional	0,30	Cukup Tangguh	68	0,204
	Jumlah	2,00			1,503

$$*) \text{SKOR} = \frac{\text{bobot parameter} \times \text{nilai kuantitatif parameter}}{100}$$

Tabel-6 : Ketahanan Gatra Hankam

NO	PARAMETER	BOBOT	NILAI		SKOR *)
			KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	Kesadaran bela negara	0,30	Tangguh	75	0,225

2.	Kepemimpinan	0,30	Tangguh	82	0,246
3.	Profesionalisme TNI	0,30	Tangguh	80	0,240
4.	Profesionalisme Polri	0,30	Tangguh	75	0,225
5.	Kamtibmas	0,20	Cukup Tangguh	70	0,140
6.	Sishannas	0,20	Tangguh	75	0,150
7.	Pembinaan Linmas	0,20	Tangguh	77	0,154
8.	Industri & Prasarana pendukung Sishannas	0,20	Cukup Tangguh	67	0,134
	Jumlah	2,00			1,514

$$*)SKOR = \frac{\text{bobot parameter} \times \text{nilai kuantitatif parameter}}{100}$$

Tabel-7 : Ketahanan Gatra Ideologi

NO	PARAMETER	BOBOT	NILAI		SKOR *)
			KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	Penghayatan agama dan kepercayaan	0,60	Tangguh	80	0,480
2.	Kesadaran berbangsa dan bernegara	0,40	Tangguh	70	0,280
3.	Demokratisasi	0,60	Tangguh	80	0,480
4.	Kewaspadaan terhadap pengaruh negatif dalam kehidupan agama	0,40	Tangguh	80	0,320
5.	Kewaspadaan terhadap pengaruh negatif ideology asing	0,40	Tangguh	75	0,300
6.	Kesadaran terhadap pengaruh negatif serta terhadap kesadaran berbangsa dan berneg.	0,60	Tangguh	85	0,510
	Jumlah	3,00			2,370

$$*)SKOR = \frac{\text{bobot parameter} \times \text{nilai kuantitatif parameter}}{100}$$

Tabel-8 : Ketahanan Gatra Politik

NO	PARAMETER	BOBOT	NILAI		SKOR *)
			KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	Sismennas	0,40	Tangguh	80	0,320
2.	Sitem kehidupan politik	0,50	Tangguh	80	0,400
3.	Otonomi daerah	0,70	Tangguh	70	0,490
4.	Kualitas pelayanan public	0,70	Tangguh	80	0,560
5.	Penegakkan hukum	0,70	Tangguh	85	0,595
	Jumlah	3,00			2,365

$$*)SKOR = \frac{\text{bobot parameter} \times \text{nilai kuantitatif parameter}}{100}$$

Tabel-9:Ketahanan dari Kemauan dan Kemampuan Membangun

NO	PARAMETER	BOBOT	NILAI		SKOR*)
			KUALITATIF	KUANTITATIF	
1	Partisipasi	0,60	Tangguh	80	0,480

	pembangunan				
2	Kesadaran bayar pajak	0,70	Tangguh	75	0,525
3	Swadaya pembangunan	0,80	Tangguh	80	0,640
4	Keterpaduan pusat dan daerah	0,40	Tangguh	80	0,320
5	Keterpaduan supra, infra dan sub struktur	0,50	Tangguh	75	0,375
	Jumlah	3,00			2,340

$$*)SKOR = \frac{\text{bobot parameter} \times \text{nilai kuantitatif parameter}}{100}$$

Tabel-10 : Ketahanan Respon Luar Negeri

NO	PARAMETER	BOBOT	NILAI		SKOR*)
			KUALITATIF	KUANTITATIF	
1	Dukungan terhadap pemerintah dari luar negeri	0,40	Tangguh	80	0,320
2	Jumlah PMA	0,40	Tangguh	80	0,320
3	Embargo	0,10	Cukup Tangguh	70	0,070
4	Ecolabelling	0,10	Tangguh	75	0,075
	Jumlah	1,00			0,785

$$*)SKOR = \frac{\text{bobot parameter} \times \text{nilai kuantitatif parameter}}{100}$$

Tabel-11 : Jumlah Skor Skalar Massif

NO	PARAMETER	SKOR*)
1	Geografi	0,778
2	Demografi	0,660
3	Sumber Daya Alam	0,825
4	Ekonomi	2,331
5	Sosial Budaya	1,503
6	Hankam	1,514
	Jumlah	7,611

Tabel-12 : Jumlah Skor Skalar Vektor Dinamik

NO	PARAMETER	SKOR*)
1	Ideologi	2,370
2	Politik	2,365
3	MMB	2,340
4	RLn	0,785
	Jumlah	7,860

Nilai Ketahanan Nasional Propinsi Lampung

$$T = (G + D + SKA + E + S + H) \times (I + P + MMB + RL_n)$$

$$T = (0,778 + 0,660 + 0,825 + 2,331 + 1,503 + 1,514) \times (2,370 + 2,365 + 2,340 + 0,785)$$

$$T = 7,611 \times 7,860$$

$$T = 59,822 \rightarrow \text{Cukup Tangguh}$$

Apabila diperhatikan nilai cukup tangguh, dipengaruhi oleh komponen yang melemahkan dan kekuatan gangguan sebagai berikut :

<i>Komponen yang melemahkan</i>	: 10 – 7,860	= 2,140
<i>Kekuatan Gangguan</i>	: 7,611 X 2,140	= 16,288 (Arah lain)

Angka 16,288 merupakan arah vektor yang menyimpang dari arah yang diharapkan atau diragukan, karena masalah ideologi, politik, kemauan dan kemampuan untuk membangun, serta respons dari luar negeri. Masalah ini bersifat dinamis, yang dapat ditingkatkan melalui sikap dan perilaku masyarakat di Provinsi Lampung. Apabila arah tersebut sesuai dengan yang diharapkan, maka TANNAS menjadi tangguh (59,822 + 16,288 = 76,110). Namun apabila arah tersebut menyimpang dari yang diharapkan, atau mengarah kepada hal-hal yang negatif dan menghambat, maka TANNAS menjadi kurang tangguh (59,822 – 16,288 = 43,534).

Semua prediksi diatas, masih dapat diperdebatkan, namun dengan pendekatan teori yang digunakan (teori momentum), hal ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Provinsi Lampung.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil analisis Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung, dibandingkan dengan kondisi secara nasional, berada pada posisi tengah. Dilihat dari ketahanan geografi, Provinsi Lampung dikatakan tangguh dan perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan karena dilihat dari letak geografinya,

Provinsi Lampung memiliki posisi yang strategis dan ekonomis terutama dalam jalur transportasi nasional, baik jalur darat maupun jalur laut.

Kemudian dari gatra politik dalam hal kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penelitian lembaga Ombudsman Lampung yang dipublikasikan di media massa lokal bahwa kinerja pelayanan publik di Provinsi Lampung maupun di beberapa Kabupaten/Kota tergolong buruk, hal ini juga akan memiliki dampak bagi perkembangan investasi di Lampung yang justru akan membawa dampak bagi ketahanan daerah Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Secara umum ditinjau dari nilai kuantitatif Astagatra, Ketahanan Nasional provinsi Lampung berada pada rentang antara 43,534 dengan 76,110, atau tepatnya sesuai perhitungan rumus yang digunakan sebesar 59,822 yang dikategorikan cukup tangguh. Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung ini, akan terus meningkat apabila upaya-upaya meningkatkan faktor dinamik terus diprioritaskan.

2. Saran

- a. Pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam hendaknya dapat segera direalisasikan melalui eksploitasi dan pengembangan industri hilir, dengan demikian maka percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan penduduk

- dapat segera dicapai sehingga kesejahteraan semakin meningkat.
- b. Diperlukan sinergi antara pihak terkait dalam mewujudkan masyarakat Lampung yang adil dan makmur melalui pemerintahan yang bersih (*Good Gvernance*) sehingga ketahanan nasional Provinsi Lampung akan lebih meningkat.
 - c. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia lebih dioptimalkan sehingga akan terwujud masyarakat Lampung yang madani dengan menciptakan sikap berswadaya pembangunan, meningkatnya kesadaran membayar pajak, peluang pendidikan dan perekonomian, yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Analisis ini merupakan analisis dari kondisi wilayah Provinsi Lampung, dalam menilai tingkat Ketahanan Nasional di daerah, mudah-mudahan akan ada manfaatnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Hendrajaya, Lilik, *Pengukuran Ketahanan Nasional*, Lemhannas III, 2009.

Pranowo,H Bambang, 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet.

Kementerian PPN/Bappenas, 2013, *Simreg Bappenas : Profil Lampung* (internet),<http://simregbappenas.net/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%20Lampung%.Pdf>> (diakses 23 desember 2013).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

BadanPusatStatistik(BPS),2013,<http://lampung.bps.go.id/?r=tabelStatistik/tampil&id=7>> (diakses 23 desember 2013)

BKKBN Provinsi Lampung, 2013<<http://www.lampungprov.go.id>> (diakses 23 desember 2013).

Diskominfo Provinsi Lampung, 2013 <<http://www.lampungprov.go.id>> (diakses 23 desember 2013).

Kesbangpol Provinsi Lampung, 2013 <<http://www.lampungprov.go.id>> (diakses 23 desember 2013).

www. Pariwisatalampung.com, 2013, (diakses 23 desember 2013).

www. RRI Bandarlampung.co.id, 2013 (diakses 23 desember 2013)

ISSN : 2443-1214

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 2 Agustus 2015

Diterbitkan Oleh :
Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi
Universitas Bandar Lampung

